

BAB II
COMPANY PROFILE
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) JAWA TENGAH

A. Sejarah Terbentuknya KPU di Indonesia

Walaupun Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu pertama di Indonesia namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan pada 4 April 1953 dan menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD) berkedudukan di setiapM daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap kecamatan. Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan di setiap desa dan panitia pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II, yangterjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit

Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada Dekrit itu pula Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mengutarakan pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan kepartaian di Indonesia. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia. Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960, ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan Pemilu Kepresidenan. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat Soekarno, diinstruksikan untuk menetapkan orang yang mengangkatnya menjadi Presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pasca kudeta G 30 S/PKI.

Tingkat pemerintahan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Soeharto menggantikan jabatan Presiden Soekarno. Dimasa pemerintahan orde baru Presiden Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. LPU terbentuk berdasarkan Keppres No 3 Tahun 1970 diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Menyusul runtuhnya rezim orde baru yang diakibatkan gejolak politik dimasyarakat. Presiden Soeharto mengumumkan pemunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan jabatan ke Presidenan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin

Jusuf Habibie. Pada masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dibentuk melalui Keppres No 16 Tahun 1999.

LPU yang dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakilwakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlahkan 53 anggota dan dilantik. oleh Presiden BJ.Habibie.Pembentukan KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu, adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena kepemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 pemerintahan orde baru sudah dianggap tidak mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat.

Dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkaskan masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu ditahun 1999 itu sendiri menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan wakil Presiden RI yang ke 3. Dimasa jabatan Presiden Addurrahman Wahid, beliau melakukan perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 Tahun 2001.¹⁷ Perombakan struktur KPU ini merupakan upaya perbaikan dari pembentukan KPU sebelumnya dijamin pemerintahan PresidenBJ.Habibie. Perombakan struktur tersebut dapat dilihat dari pemangkasan struktur penjabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang.

A. Struktur KPU

Struktur KPU pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ini terdiri dari unsur LSM serta akademisi yang beranggotakan berjumlah 11 orang. Hal ini dibuat supaya mekanisme kerja komisi pemilihan umum dapat berjalan lebih efektif dibandingkan dengan KPU sebelumnya yang beranggotakan 53 orang. Pelantikan struktur KPU tersebut dilakukan pada tanggal 11 april 2001 dan dilantik secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode pemilu kedua pasca orde baru ini Pemilu dilaksanakan lebih tertib dan konprehensif mengingat perubahan-perubahan yang terus dilakukan untuk membenahi dan memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia.

Ketua: Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A.

Anggota :

- Prof. Ramlan Surbakti, M.A, Ph.D.
- Drs. Mulyana W. Kusumah
- Drs. Daan Dimara, MA.
- Dr. Rusadi Kantaprawira
- Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, PhD.
- Drs. Anas Urbaningrum, M.A.
- Chusnul Mar'iyah, Ph.D.
- Dr. F.X. Mudji Sutrisno, S.J.
- Dr. Hamid Awaluddin
- Dra. Valina Singka Subekti, MSi

Pemilu kedua ini menghasilkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan Prof.Dr.H. Hamza Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-4. Setahun pasca pergantian Kepemimpinan Negara, Presiden Megawati Soekarno Putri merancang Keppres mengenai pembentukan tim seleksi anggota KPU. Fungsi dari tim seleksi yang dibuat adalah membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi anggota KPU bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini dibuat berdasarkan Keppres No 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU dalam menghadapi Pemilihan umum di Tahun 2004 yang akan datang.

Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepengurusan KPU yang pertama pasca perbaikan struktur KPU yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan H.M. Yussuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-5. Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai keistimewaan tersendiri dipasca era reformasi demokrasi. Beliau memenangkan 2 kali tahapan Pemilu Presiden mengalahkan saingan lainnya di Pemilu 2004 dan 2009. Presiden SBY merombak pasangan wakil Presiden di tahap ke dua masa jabatannya menjadi Prof.Dr.Buediono,M.Ec sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pembentukan kepengurusan KPU yang kedua ini dilakukan berdasarkan Keppres No 12 Tahun 2007 mengenai pembentukan tim seleksi keanggotaan KPU.

Tim seleksi calon anggota KPU yang terakhir (ketiga), dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU tanggal 2 December 2011 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.15 tahun 2011 dan undang-undang sebelumnya pasca perbaikan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU yang ketiga ini mempunyai jumlah sebanyak 7 orang anggota dan terdiri dari peneliti, birokrat, serta akademisi.



B. Lambang KPU

Makna yang terkandung dalam lambang KPU tersebut adalah:

- a. Bentuk segiempat lonjong menggambarkan bentuk perisai yang bermakna penjagaan diri.
- b. Burung garuda dan lambang lima sila Pancasila yang berada di tengah melambangkan dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila.
- c. Warna merah putih yang juga berada di tengah merupakan warna bendera resmi Indonesia.
- d. Tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM menyatakan bahwa lambang ini dimiliki oleh KPU

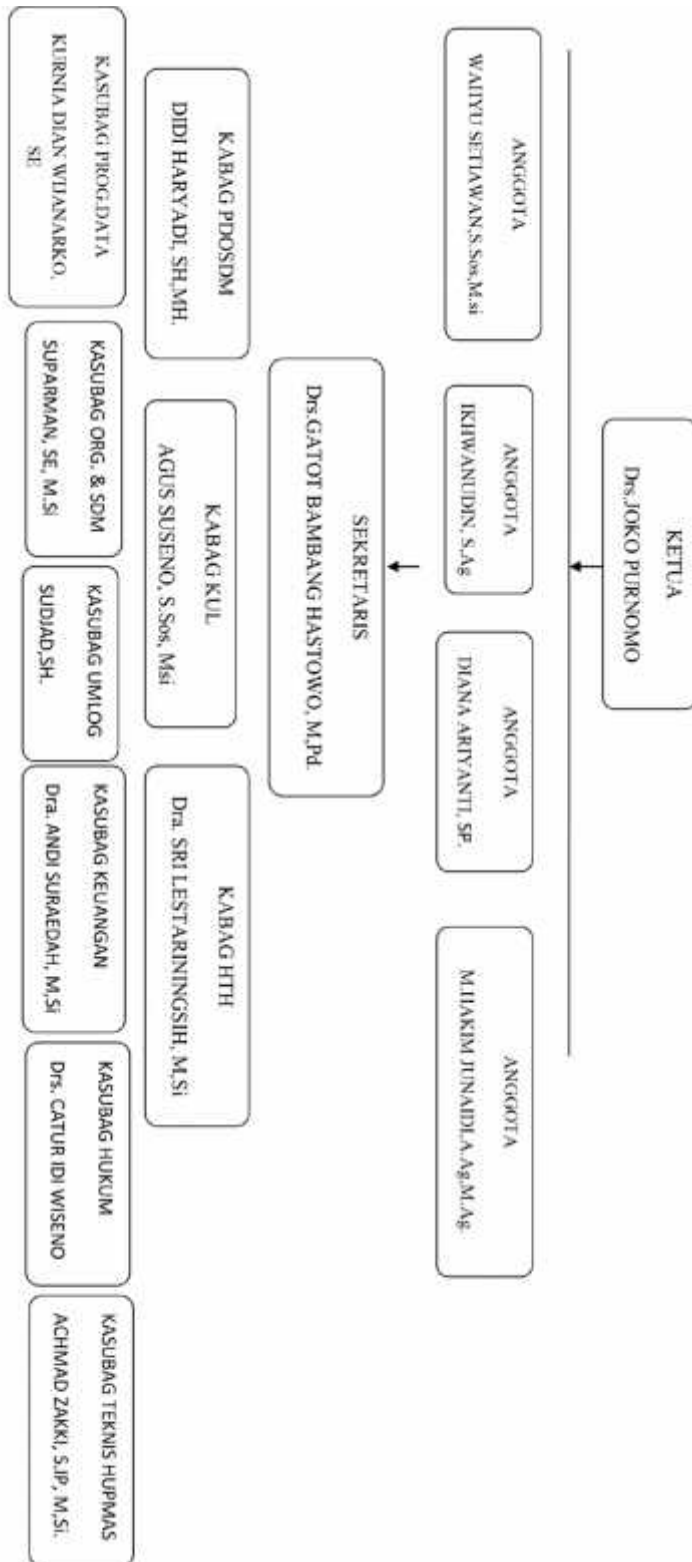
Arti warna yang terdapat pada lambang KPU adalah:

- 1) Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
- 2) Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan.
- 3) Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.
- 4) Warna merah melambangkan keberanian.
- 5) Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran

C. STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2016



Gambar 2.2

D. VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM



Dok. KPU Provinsi Jawa Tengah :Visi & Misi Komisi Pemilihan Umum.

Gambar 2.3



Foto : Bangunan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

E. Contoh Kegiatan HUPMAS di KPU Provinsi Jawa Tengah .

- Mengadakan Seminar / workshop tentang Pemilu.
- Membentuk komunitas Peduli Pemilu .
- Sosialisasi anti Golput.
- Menjadi tim seleksi calon Kepala Daerah beserta Wakil untuk PILKADA.
- Diskusi tentang kepemiluan kepada organisasi Mahasiswa / Masyarakat.
- Mengelola Rumah Joglo Pemilu untuk sarana pendidikan Politik.
- Membuat Jurnal KPU (Majalah tentang politik / kepemiluan

A. Media Relations

Seorang Humas harus bisa menyebarkan informasi serta memperoleh dukungan dan kepercayaan dari publiknya melalui media massa. Oleh karena itu, kegiatan media relations atau press relation dalam membangun hubungan baik dengan kalangan wartawan media cetak, online dan elektronik sangat perlu diperhatikan. Sebagai Humas yang baik, harus bisa memahami media, bagaimana cara kerja wartawannya dan bagaimana berita dari media itu dimuat. Dalam menjalin hubungan dengan para wartawan, KPU Provinsi Jawa Tengah membentuk grup di media sosial whatsapp agar memudahkan penyampaian informasi. Selain itu, sering pula diadakan gathering atau pertemuan santai untuk menambah keakraban. Usaha ini dilakukan untuk mengantisipasi pemberitaan *unfavorable* yang dibuat oleh wartawan. Bukan semata-mata untuk menyebarkan suatu pesan sesuai dengan keinginan perusahaan namun diharapkan wartawan dapat membuat berita sesuai fakta yang telah disampaikan oleh sumber yang resmi dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Berikut kegiatan Humas yang berhubungan dengan media :

- **Analisis Berita.**

Analisis Berita atau Monitoring media adalah meninjau pemberitaan menyangkut KPU Provinsi Jawa Tengah yang beredar di media massa, baik itu dari media cetak maupun dari media online. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pemberitaan KPU Provinsi Jawa yang ada di media massa. Melalui analisis yang telah didapatkan dari monitoring media setiap harinya, Subbag Teknis & Hupmas dapat langsung menangani apabila banyak berita yang unfavorable. Adapun beberapa media cetak yang selalu dimonitoring oleh Subbag Teknis & Hupmas antara lain: Jawa Pos, Suara Merdeka, Jateng Pos, Wawasan, Tribun Jateng, Kompas, dan Rakyat Jateng.

Cara melakukan Monitoring Berita :

NO.	NAMA MEDIA	BULAN	JUMLAH BERITA	BERITA POSITIF (+)	BERITA NEGATIF (-)
1	Kompas	Juli	6	4	2
2	Suara Merdeka	Juli	8	6	2
3	Suara Merdeka	Agustus	3	2	1
4.	Suara Merdeka	September	11	8	3
5.	Kompas	September	6	4	2

SUMBER: Arsip KPU Provinsi Jawa Tengah .

- ***Press Release & Konferensi Pers***

Press Release atau siaran pers adalah salah satu produk Humas yang sangat penting, karena melalui press release Humas dapat mengkomunikasikan informasi yang ingin disampaikan perusahaan ke media. Tantangannya, informasi yang disampaikan harus memiliki nilai berita serta sesuai fakta, akurat, mengandung 5W+ 1H, sehingga jika wartawan dapat menemukan nilai berita di siaran pers yang kita buat, maka wartawan lebih mudah digiring untuk mendalami permasalahan atau topik yang ingin disampaikan perusahaan. Siaran pers pelatihan Pemilu dan Demokrasi.

Press Release : **Merintis Entitas Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Melalui Kursus Kepemiluan**

Semarang, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kursus kpepiluan dalam rangka pengembangan komunitas peduli pemilu dan pemokrasi Tahun 2016. Kursus dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 10 hingga 12 Agustus 2016 di Aula Lantai 3 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Peserta yang mengikuti kursus berjumlah 30 orang, berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Mereka yang hadir mewakili beberapa segmen di masyarakat antara lain mahasiswa, perempuan, aktivis LSM dan ormas.

Acara pelatihan kepemiluan dibuka secara simbolis oleh Anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Sigit Pamungkas SIP, MA ditandai dengan penyematan tanda pengenalan peserta kursus. Selain membuka acara, Sigit Pamungkas juga memberikan materi mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Partisipasi kepada para peserta kursus.

Tujuan dari penyelenggaraan acara kursus ini, untuk mendorong lahirnya embrio komunitas-komunitas yang peduli dengan isu-isu pemilu dan demokrasi sehingga dapat menjadi mitra strategis KPU dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi.

Materi kursus yang disampaikan antara lain Prinsip-Prinsip Dasar Partisipasi; Prinsip-Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur, Adil dan Tidak Diskriminatif; Lembaga Penyelenggara Pemilu; Tahapan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu. Setiap sesi dipandu oleh fasilitator. Bertindak sebagai fasilitator adalah komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah dan narasumber yang membidangi.

Seluruh peserta yang hadir sangat antusias dan aktif mengikuti setiap sesi kursus kepemiluan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Di akhir kursus peserta membuat rencana tindak lanjut untuk program kegiatan kedepan. (Suara Merdeka 13 Agustus 2016)

- **Media Gathering**

Kegiatan *Media Gathering* yaitu berkerja sama dengan media baik media cetak , online dan elektronik (TV) guna menjaga hubungan baik dengan pihak media. KPU Provinsi Jawa Tengah juga pernah melakukan kerja sama dengan Media Suara Merdeka dan Tabloid Cempaka. Dihadiri oleh pemimpin redaksi dan 1 crew dari Media Suara Merdeka serta pimpinan redaksi dan 1 crew dari tabloid Cempaka, juga dihadiri oleh anggota KPU Jawa Tengah dan para pimpinan pejabat struktural KPU Jawa Tengah. Dalam kerjasama memberikan tips untuk menyusun Jurnal Suara KPU Jawa Tengah tahun 2016. Serta liputan acara yang melibatkan eksternal di KPU Provinsi Jawa Tengah.

- **Pendokumentasian**

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang dapat mendukung penyediaan setiap informasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Selain itu, juga sebagai bahan pendukung pemenuhan materi dalam setiap pembuatan press release. Sedangkan liputan merupakan suatu kegiatan pencarian berita tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dijadikan sebagai materi pembuatan press release. Kegiatan liputan ini terdiri dari meliputi acara internal relations seperti : Rapat, Seminar, ataupun acara Serah Terima Jabatan) dan eksternal relations seperti acara Gathering, Lomba dan kunjungan dari instansi atau sekolah.

Hasil Dokumentasi :

Gambar 2.1



Gambar 2.2



Acara Kursus Kepemiluan Dalam Rangka Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu & Demokrasi Tahun 2016. Mekanisme acara kursus pemilu yang di sampaikan bu Tari selaku Kassubag Hukum KPU Jawa Tengah serta Materi Sosialisasi Pemilu yang disampaikan Pak Wahyu selaku anggota KPU Jawa Tengah & keaktifan peserta untuk berpendapat.

Gambar 2.3



Gambar 2.4



Dokumentasi Kegiatan Rapat Kerja dalam Rangka Pengelolaan Program & Anggaran (Rutin & Hibah) TA. 2016 serta Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2017. Penyampaian materi oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Para peserta terdiri dari pejabat struktural dari 32 KPU Kota / kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.5



Gambar 2.6



Dokumentasi Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 71 di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. Lomba kelompok dalam memperingati HUT RI ke 71 serta Pembagian Hadiah para pemenang setelah Upacara 17 Agustus 2016.

FUNGSI DOKUMENTASI :

- 1. Memberikan informasi yang diperlukan.** Dokumentasi atau penyimpanan dokumen ini sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi pada saat ada pertemuan atau kegiatan yang membutuhkan informasi terkait.
- 2. Memberikan bukti dan data keterangan.** Suatu saat, dokumen-dokumen akan menjadi bukti dari sejarah keberadaan organisasi yang dipertanyakan. Dokumentasi membantu untuk menyimpan bukti nyata yang pernah terjadi di suatu organisasi.
- 3. Melestarikan sejarah organisasi dari kemusnahan.** Jika suatu saat organisasi mengalami masalah dan dibubarkan, organisasi tidak akan musnah begitu saja karena adanya dokumentasi yang utuh.
- 4. Digunakan dalam konferensi atau seminar.** Pengalaman dalam suatu organisasi juga akan dibutuhkan untuk bahan penyelenggaraan seminar. Data dan informasi ini selayaknya disimpan dalam dokumentasi dan akan mudah dilihat kembali jika disimpan dengan baik.

B. Pendidikan Politik

▪ Seminar dan Workshop

Seminar atau Workshop merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang pemilu dan demokrasi kepada mahasiswa & tokoh masyarakat. Selama KKPT berlangsung penulis mengikuti seminar atau workshop, yaitu pada tanggal 10 – 12 Agustus 2016 **“Acara Kursus Kepemiluan Dalam Rangka Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu & Demokrasi Tahun 2016.”**

Gambar 2.7



C. Political Community Relations

Subbag Teknis & Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah melakukan aktivitas sosialisasi anti golput melalui aktivitas / kegiatan berupa media relations (bekerja sama dengan pihak media / pers untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan Pemilu / Pilkada), publikasi (menyebarkan sosialisasi pemilu melalui media luar ruang) dan community relations (dengan mengajak seluruh komponen masyarakat seperti Ormas, Mahasiswa, LSM, Parpol, Instansi Pemerintah dll untuk turut bekerjasama. Pada saat acara **Kursus Kepemiluan Dalam Rangka Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu & Demokrasi Tahun 2016.”**